



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
 21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Lumbang, hasil evaluasi Renja Kecamatan Lumbang tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Lumbang tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Lumbang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI	
Pejabat	Tanggal
Sekretaris Daerah	
Asisten PKR	
Kepala Bappeda	
Camat Lumbang	
Kabag Hukum	
Sekretaris Kecamatan	
Kabid Sosbud Bappeda	

Ditetapkan di Pasuruan,
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 65

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN LUMBANG



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

Email: lumbang@pasuruankab.go.id
Jalan Raya Cukurguling No. 08
Lumbang - 67183

RENCANA KERJA
KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Lumbang tahun 2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Renja OPD Kecamatan Lumbang disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

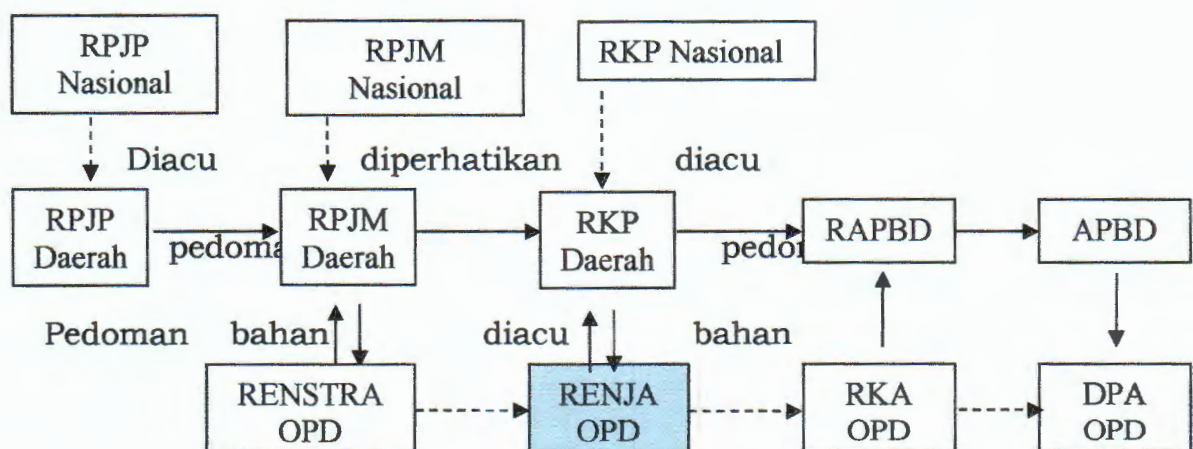
Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan kesetaraan gender dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Lumbang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Lumbang untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;
3. Renja Kecamatan Lumbang merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Lumbang pada Tahun 2022 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Lumbang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Lumbang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Lumbang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Lumbang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Lumbang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lumbang pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lumbang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Lumbang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Lumbang sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2020 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Lumbang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Lumbang;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Lumbang.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
19. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2020;
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2020.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2020– 2022;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020- 2023.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2022, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Lumbang dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Lumbang disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Lumbang, proses penyusunan Renja Kecamatan Lumbang, keterkaitan antara Renja Kecamatan Lumbang dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Lumbang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Lumbang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Lumbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Lumbang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lumbang Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lumbang, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lumbang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Lumbang untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan Lumbang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lumbang dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Lumbang serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Lumbang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Urusan Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kecamatan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium jasa adm keuangan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	96 Orang/Bulan	100%			
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya honorarium jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Banungan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%			
	Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%			
	Penyediaan Makan dan Minum	tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%			
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Terlaksananya Rapat dan konsultasi Luar daerah	1 ls	1 ls	1 ls	1 ls	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPKL yang berkualitas	120 org / bln	120 org / bln	120 org / bln	120 org / bln	100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket		1 Paket		0%			
	Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan kantor	1 ls	1 ls	1 ls	1 ls	100%			
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 ls	1 ls	1 ls	1 ls	100%			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan, Nilai SAKIP Kecamatan	86,89 70,63		86,89 70,63	86,89 70,63	100%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan tingkat Kecamatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			
	Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan Laporan Keuangan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina - Persentase usuan musrenbang yang terfasilitasi	4 Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	100%			
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%			
	Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial masyarakat di tingkat Kecamatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%			
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan	95%	50%	65%	65%	100%			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbang	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%		100%	100%	100%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4 kali		4 kali	4 kali	100%			
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Kegiatan	1 kali		1 kali					
2021										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%					100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%					100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap					5 Lap		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%					100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	210 org/bln					210 org/bln		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	120 Orang/ bln					120 Orang/ bln		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	96 org/bln					96 org/bln		
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-					-		
	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	-					-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%					100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis					10 Jenis		
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah pembelian ATK Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	60 jenis kali 13 jenis					60 jenis kali 13 jenis		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	32 Jenis					32 Jenis		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Pembelian bahan bacaan	12 eksemplar					12 eksemplar		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Konsumsi Rapat dan Tamu Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	720 orang 1 ls					720 orang 1 ls		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rasio jumlah penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%					100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-					-		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 unit					3 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan kantor	2 unit					2 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%					100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, air dan internet selama 12 bulan	48 rekening bulan					48 rekening bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%					100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 unit					11 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1 ls					1 ls		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit					1 Unit		
	Urusan Kewilayahan									
	Bidang Kecamatan									
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan	100%					100%		
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan					1 Laporan		
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Jumlah peserta aparatur desa yang dibina	2 laporan 85 Peserta					2 laporan 85 Peserta		
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan keurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	4 lembaga					4 lembaga		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 laporan					6 laporan		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%					100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan bersama Muspika dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	4 laporan					4 laporan		
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Tersedianya sarana prasarana dalam rangka penanggulangan covid 19	1 Tahun					1 Tahun		

Pasuruan,
Camat Lumbang

ttd.

MOH. SUCAHYONO, SE., MMA.
Pembina
NIP. 196510251986031019

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran belanja / pengeluaran OPD Kecamatan Lumbang tahun 2020 adalah belanja tidak langsung gaji sebesar Rp. 1.848.525.000,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.594.113.979,- atau sebesar 86,24%, kemudian belanja langsung sebesar Rp. 911.256.300,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 838.614.294,- atau sebesar 92,03% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Lumbang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	BELANJA	2.199.837.965	2.153.647.368	97,95
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.661.802.000	1.650.973.868	99,35
5.1.1	Belanja Pegawai	1.661.802.000	1.650.973.868	99,35
5.2	BELANJA LANGSUNG	538.035.965	503.673.500	93,61
5.2.1	Belanja Pegawai	80.440.000	73.860.000	91,82
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	403.995.965	376.213.500	93,12
5.2.3	Belanja Modal	53.600.000	53.600.000	100
	Jumlah Belanja	2.199.837.965	2.153.647.368	97,90

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Lumbang sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAFTAR REKAPITULASI
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU)
per 31 Desember 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	538.035.965,00	503.673.500,00	(34.362.465,00)
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN	538.035.965,00	503.673.500,00	(34.362.465,00)
4.01 . 4.01.09 . 21	KECAMATAN LUMBANG	538.035.965,00	503.673.500,00	(34.362.465,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	375.263.215,00	351.646.894,00	(23.616.321,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.700.000,00	24.037.144,00	(1.662.856,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.840.000,00	39.060.000,00	(780.000,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4.730.000,00	4.480.000,00	(250.000,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	865.000,00	865.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.932.215,00	35.808.750,00	(15.123.465,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Perencanaan	205.000.000,00	199.200.000,00	(5.800.000,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 01 . 23	Penyediaan Pakai Kerja	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ARAKATUR	94.150.000,00	91.914.106,00	(2.235.894,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 02 . 22	Pemeliharaan Ruangan/Berkas Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 02 . 24	Pemeliharaan Ruangan/Berkas Kendaraan Dinas/Operasional	29.300.000,00	27.064.106,00	(2.235.894,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 02 . 30	Pemeliharaan Ruangan/Berkas Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	40.567.750,00	32.057.500,00	(8.510.250,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 41 . 01	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 41 . 02	Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	29.967.750,00	21.057.500,00	(8.910.250,00)
4.01 . 4.01.09 . 21 . 41 . 03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 42	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	25.805.000,00	25.805.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 42 . 01	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	5.805.000,00	5.805.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 42 . 03	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 42 . 08	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 43	PROGRAM KEBENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 43 . 02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Kecamatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 21 . 43 . 03	Pelibatan Pengendalian Keamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	0,00	0,00	0,00

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lumbang sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.
- f. Sistem Pengelolaan Anggaran Kelurahan yang mengalami perubahan, dimana di tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem hibah dan anggaran melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekta Kabupaten Pasuruan, sejak tahun anggaran 2016 anggaran Kelurahan melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD masing-masing Kecamatan, sehingga pelaksana pengelolaan keuangan Kelurahan masih beradaptasi dengan hal tersebut.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lumbang dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

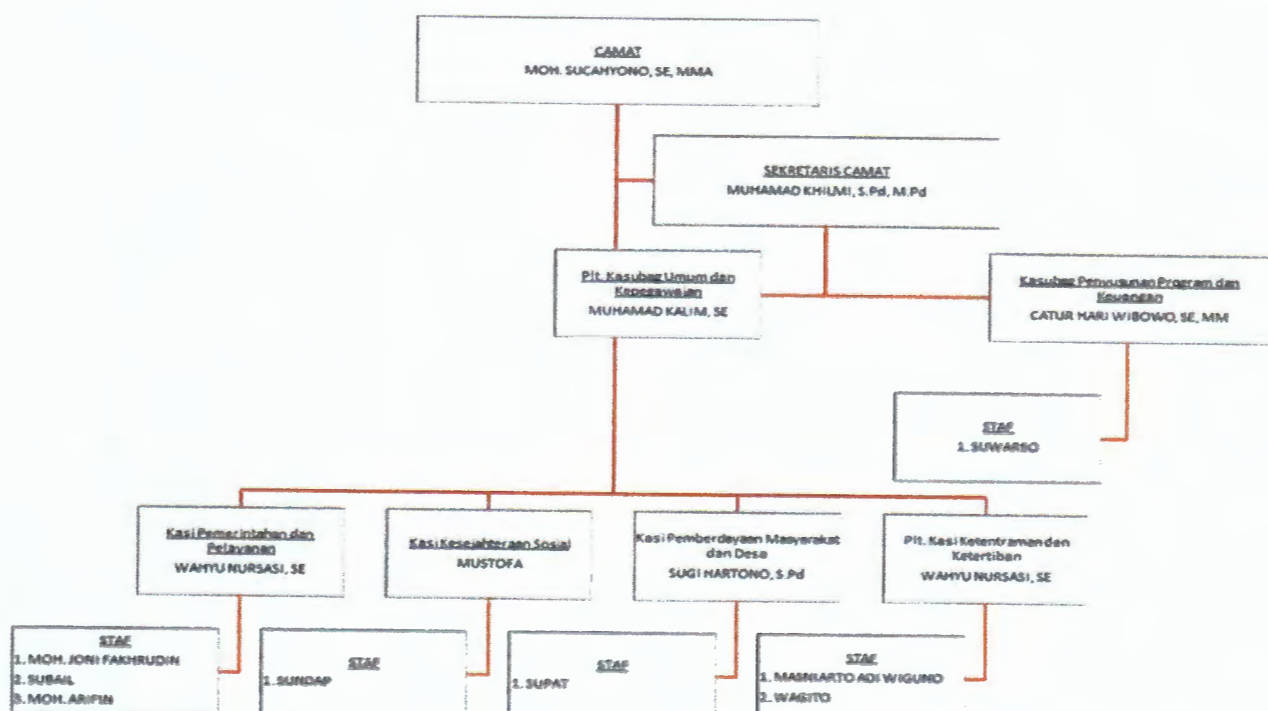
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Lumbang dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lumbang yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lumbang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Lumbang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2020-2022)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec. Lumbang
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Kec. Lumbang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			83,00 Nilai	87,00 Nilai	87,50 Nilai	88,00 Nilai	86,89 Nilai		87,50 Nilai	88,00 Nilai	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan			62,00 Nilai	70,70 Nilai	75,50 Nilai	80,10 Nilai	70,63 Nilai		75,50 Nilai	80,10 Nilai	

Dari tabel 2.2 di atas diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Utama Nilai IKM Kecamatan telah terealisasi sebesar 86,89, nilai tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra yaitu sebesar 83,00 dengan persentase Capaian Kinerjanya sebesar 104,69%. Untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan telah terealisasi sebesar 70,63 dari Nilai 62,00 yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 113,92% atau telah mencapai target yang diperjanjikan. Pada Tahun 2022 untuk Indikator Nilai IKM Kecamatan diproyeksikan dengan target 87,50 dan Nilai 75,50 untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan. Pada proyeksi Tahun 2023 diharapkan untuk Indikator Nilai IKM Kecamatan bisa memperoleh Nilai 88,00 dan Nilai 80,10 untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Lumbang sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan	Pelayanan Publik

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Lumbang merupakan bagian integral dalam proses prancanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran-sasaran Kecamatan Lumbang pengelompokannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Uraian	Indikator		
1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan	1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat	- Menyusun Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
		1.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas dan Optimalisasi Anggaran	- Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai capaian indikator kinerja

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Lumbang diperoleh hasil yang sama antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan nilai Anggaran sebesar Rp 3.019.054.000,- (Tiga Milyar Sembilan Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Unsur Kewilayah					Urusan Unsur Kewilayah					
	Bidang Urusan Kecamatan					Bidang Urusan Kecamatan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Lumbang	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	75,50 Nilai	2.822.554.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Lumbang	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	75,50 Nilai	2.822.554.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	2.269.354.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	2.269.354.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan / 210 org/bln	1.988.754.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan / 210 org/bln	1.988.754.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Jasa Kantor dan Jumlah Pembayaran Jasa Petugas	12 org/ bulan 132 org/bln	234.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Jasa Kantor dan Jumlah Pembayaran Jasa Petugas	12 org/ bulan 132 org/bln	234.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset	12 bulan / 96 org / bulan	46.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset	12 bulan / 96 org / bulan	46.600.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	5 stel	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	5 stel	10.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Lumbang	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Lumbang	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Persentase pemenuhan operasional kantor	100%	192.530.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Lumbang	Persentase pemenuhan operasional kantor	100%	192.530.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Lumbang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Lumbang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	4.000.000	
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Lumbang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73 Jenis	20.000.000	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Lumbang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73 Jenis	20.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	32 Jenis	13.000.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	32 Jenis	13.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Lumbang	Jumlah pembelian bahan bacaan	12 eksemplair	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Lumbang	Jumlah pembelian bahan bacaan	12 eksemplair	2.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	153.130.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Lumbang	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	153.130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Lumbang	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Sub Kegiatan	159.641.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Lumbang	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Sub Kegiatan	159.641.400	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	74.641.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	74.641.400	
	Pengadaan Mebel	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Mebelair	3 Unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Mebelair	3 Unit	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	5 Unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	5 Unit	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Lumbang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	51.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Lumbang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	51.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	48 rekening	51.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Lumbang	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	48 rekening	51.250.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lumbang	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Sub Kegiatan	119.778.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lumbang	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Sub Kegiatan	119.778.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Lumbang	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	11 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Lumbang	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	11 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 ls	8.378.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	1 ls	8.378.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	11.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Lumbang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	11.400.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Lumbang	Meningkatnya Nilai SKM Kecamatan	87,50	38.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Lumbang	Nilai SKM Kecamatan	87,50	38.500.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Sub Kegiatan	38.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Lumbang	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Sub Kegiatan	38.500.000	
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 laporan	6.500.000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 laporan	6.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Jumlah peserta aparatur desa yang dibina	2 Laporan dan 85 Peserta	32.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan Jumlah peserta aparatur desa yang dibina	2 Laporan dan 85 Peserta	32.000.000	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec.Lumbang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Kegiatan	150.000.000	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec.Lumbang	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Kegiatan	150.000.000	
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec.Lumbang	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	4 Lembaga	150.000.000	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec.Lumbang	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	4 Lembaga	150.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Laporan	150.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Laporan	150.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lumbang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	8.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lumbang	Terlaksananya kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	8.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lumbang	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	8.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lumbang	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%	8.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Kegiatan bersama Muspika dalam penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban	4 Laporan	8.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Lumbang	Jumlah Laporan Kegiatan bersama Muspika dalam penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban	4 Laporan	8.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lumbang	Tersedianya Sarana Prasarana dalam rangka Penanggulangan Covid-19	1 Tahun	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Lumbang	Tersedianya Sarana Prasarana dalam rangka Penanggulangan Covid-19	1 Tahun	-	
	JUMLAH				Rp 3.019.054.000	JUMLAH				Rp 3.019.054.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Lumbang Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Lumbang saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Lumbang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2020
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Lumbang

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Lumbang telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 – 2022 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk		

	mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B.	Provinsi		
II.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2020- 2022	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		
	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan		

	Publik, melalui :		
	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global

- d. Memiliki integritas moral, etik, sepiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Lumbang merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran-sasaran Kecamatan Lumbang pengelompokannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Uraian	Indikator		
1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan	1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat	- Menyusun Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
		1.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas dan Optimalisasi Anggaran	- Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai capaian indikator kinerja

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

OPD Kecamatan Lumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- 19. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 9. Koordinasi Pemberdayaan Desa**
- 21. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**
- 22. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
- 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 23. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 24. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Adapun rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 serta implementasi rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kewilayahan								
	Bidang Kecamatan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		75,50 Nilai	Rp 2.822.554.000			80,10 Nilai	Rp 2.822.554.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		100%	5.000.000			100%	Rp 5.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Lumbang	5 lap	Rp 5.000.000	DAU		5 lap	Rp 5.000.000
					Belanja operasi : Rp 5.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 5.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	...								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100%	2.269.354.000			100%	Rp 2.269.354.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lumbang	12 Bulan	Rp 1.988.754.000			12 Bulan	Rp 1.988.754.000
					Belanja operasi : Rp 1.988.754.000				
					Belanja pegawai : Rp 1.988.754.000				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	Kec. Lumbang	12 Org/bulan 132 Org/bulan	Rp 234.000.000			12 Org/bulan 132 Org/bulan	Rp 234.000.000
					Belanja operasi : Rp 234.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 234.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokaal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan	Jumlah Pembayaran	Kec.	96 org / bulan	Rp 46.600.000			96 org / bulan	Rp 46.600.000
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honararium Pejabat Pengelola Keuangan, dan Aset	Lumbang		Belanja operasi : Rp 46.600.000				
					Belanja pegawai : Rp 46.600.000				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -					
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	Rp 25.000.000			100%	Rp 25.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Kec.	5 stel	Rp 10.000.000			5 stel	Rp 10.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp 10.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 10.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -					
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec.	3 orang	Rp 15.000.000			3 orang	Rp 15.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp 15.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 15.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor		100%	Rp 192.530.000			100%	Rp 192.530.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.	10 Jenis	Rp 4.000.000			10 Jenis	Rp 4.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp 4.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 4.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lumbang	60 jenis kali 13 jenis	Rp 20.000.000			60 jenis kali 13 jenis	Rp 20.000.000
					Belanja operasi : Rp 20.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 20.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Lumbang	32 Jenis	Rp 13.000.000			32 Jenis	Rp 13.000.000
					Belanja operasi : Rp 13.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 13.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan	Kec. Lumbang	12 eksemplar	Rp 2.400.000			12 eksemplar	Rp 2.400.000
					Belanja operasi : Rp 2.400.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 2.400.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Kec. Lumbang	12 Bulan	Rp 153.130.000			12 Bulan	Rp 153.130.000
					Belanja operasi : Rp 153.130.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 153.130.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tertaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan		3 Sub Kegiatan	Rp 159.641.400			3 Sub Kegiatan	Rp 159.641.400
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Kec. Lumbang	3 Unit	Rp 74.641.400			3 Unit	Rp 74.641.400
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 74.641.400				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	Kec.	3 Unit	Rp 15.000.000			3 Unit	Rp 15.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 15.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
		Belanja transfer : Rp -							
7.01.01.2.08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.	5 Unit	Rp 70.000.000			5 Unit	Rp 70.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 70.000.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
		Belanja transfer : Rp -							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Sub Kegiatan	Rp 51.250.000			1 Sub Kegiatan	Rp 51.250.000
X-XX-01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	Kec.	48 Rekening	Rp 51.250.000			48 Rekening	Rp 51.250.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp 51.250.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 51.250.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
		Belanja transfer : Rp -							
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		3 Sub Kegiatan	Rp 119.778.600			3 Sub Kegiatan	Rp 119.778.600
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec.	11 Unit	Rp 100.000.000			11 Unit	Rp 100.000.000
			Lumbang		Belanja operasi : Rp 100.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 100.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
		Belanja transfer : Rp -							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lumbang	1 ls	Rp 8.378.600	(8)	1 ls	Rp 8.378.600	
					Belanja operasi : Rp 8.378.600				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 8.378.600				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec. Lumbang	1 Unit	Rp 11.400.000	(8)	1 Unit	Rp 11.400.000	
					Belanja operasi : Rp 11.400.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 11.400.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		97,50 Skor	38.500.000		88 Skor	Rp 38.500.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		2 Sub Kegiatan	38.500.000		2 Sub Kegiatan	Rp 38.500.000	
7.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Lumbang	1 Lap	Rp 6.500.000	(8)	1 Lap	Rp 6.500.000	
					Belanja operasi : Rp 6.500.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 6.500.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan dan Jumlah Peserta Aparatur Desa yang dibina	Kec. Lumbang	2 Laporan 85 Peserta	Rp 32.000.000	(8)	2 Laporan 85 Peserta	Rp 32.000.000	
					Belanja operasi : Rp 32.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 32.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		1 Kegiatan	Rp 150.000.000		1 Kegiatan	Rp 150.000.000	
7.01.03.2.01.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang dibina		4 Lembaga	150.000.000		4 Lembaga	Rp 150.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Lumbang	6 Lap	Rp 150.000.000	(8)	6 Lap	Rp 150.000.000	
					Belanja operasi : Rp 150.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 150.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
Belanja transfer : Rp -									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		1 Kegiatan	8.000.000			1 Kegiatan	Rp 8.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		100%	8.000.000			100%	8.000.000
7.01.04.2.02.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan bersama Muspika dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kec. Lumbang	4 Lap	Rp 8.000.000			4 Lap	8.000.000
					Belanja operasi : Rp 8.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp 8.000.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam rangka Penanggulangan Covid-19	Kec. Lumbang	1 Tahun	Rp -			1 Tahun	-
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
					Total Belanja operasi : Rp 2.859.412.600				
					Belanja pegawai : Rp 2.035.354.000				
					Belanja barang dan : Rp 824.058.600				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Total Belanja modal : Rp 159.641.400				
					Total Belanja tidak terduga : Rp -				
					Total Belanja transfer : Rp -				
					Total Belanja PD : Rp 3.019.054.000				Rp 3.019.054.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2022, Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.822.554.000
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.269.354.000
2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.988.754.000
3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.000.000
4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.600.000
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000
5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000
6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.530.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
8 Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	20.000.000
9 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	13.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.130.000
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.641.400
12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.641.400
13 Pengadaan Mebel	15.000.000
14 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.250.000
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.250.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.778.600
16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
17 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.378.600
18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.400.000
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.500.000
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.500.000
19 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.500.000
20 Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	32.000.000
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	150.000.000
9. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	150.000.000
21 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	150.000.000
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000
22 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.000.000
23 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-
JUMLAH	3.019.054.000

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lumbang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lumbang

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukakan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk

melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

